



LAPORAN KINERJA | 2019



BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmatnya, sehingga pada kesempatan ini kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019.

Sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, BPK RI sebagai suatu lembaga wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja. Dalam hal ini BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu unsur pelaksana BPK RI berkewajiban pula menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja secara berkala sesuai dengan target yang telah disepakati dan ditetapkan bersama dengan unit eselon I BPK RI.

Sesuai dengan Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) Tahun 2019, telah ditetapkan sebanyak 8 (Delapan) Sasaran Strategis yang dibagi atas 27 (Dua Puluh Tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama ini meliputi tugas dan fungsi unit eselon II sebagai perwakilan BPK RI di daerah antara lain: Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli, Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang, Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara, Pemenuhan Quality Control (QC) dan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan, Ketepatan Waktu Penyampaian LHP dan Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran.

Kami berharap LAK BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 ini dapat memenuhi harapan para pemangku kepentingan serta dapat menjadi media evaluasi dalam mengukur dan menilai kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan perbaikan di masa mendatang.

Mamuju, Januari 2020

Kepala Perwakilan,

Eydu Oktain Panjaitan S.E., M.M., Ak.
NIP 196910011996031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GAMBAR	IV

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat	2
C. Struktur Organisasi BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat	2
D. Sumber Daya BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat	5

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA (PKPK) BPK RI PERWAKILAN SULAWESI BARAT

A. Perencanaan Strategis BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat	7
B. Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat	9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA (EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA BPK RI PERWAKILAN SULAWESI BARAT)

Akuntabilitas Kinerja (Evaluasi Atas Pencapaian Kinerja BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat)	11
-------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB IV PENUTUP

PENUTUP	22
----------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Alokasi Anggaran dan Realisasi TA 2019 BPK Perwakilan Sulawesi Barat ..	6
Tabel 1.2 Target pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019.....	10

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPK Perwakilan Sulawesi Barat	2
Gambar 1.2 Pegawai dan Pejabat Struktural BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat	5
Gambar 2.1 BPK <i>Wide</i>	7
Gambar 2.2 Peta Strategis AKN VI	8
Gambar 3.1 Grafik Perkembangan Realisasi IKU 1.1.....	11
Gambar 3.2 Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pada entitas di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat.....	12
Gambar 3.3 Penyerahan LHP LKPD Provinsi Sulawesi Barat	16
Gambar 3.4 Penyerahan LHP Kinerja dan LHP atas Penyelesaian Kerugian Daerah di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat	16
Gambar 3.5 Penyelenggaraan Media <i>Workshop</i>	19
Gambar 3.6 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Jam Pelatihan	20
Gambar 3.7 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Sebagai tindak lanjut atas Inpres tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Peraturan No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja tidak hanya melekat pada BPK RI sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK RI sebagaimana dinyatakan dalam peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 13 yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja diantaranya adalah (c) Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga dan (e) Unit kerja mandiri yang ditetapkan.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu Satuan Kerja di lingkungan BPK RI harus menyusun dokumen LAKIP sebagaimana tercantum dalam surat Meneg PAN & RB Nomor: B/64/M.PAN-RB/03/2011.

B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat

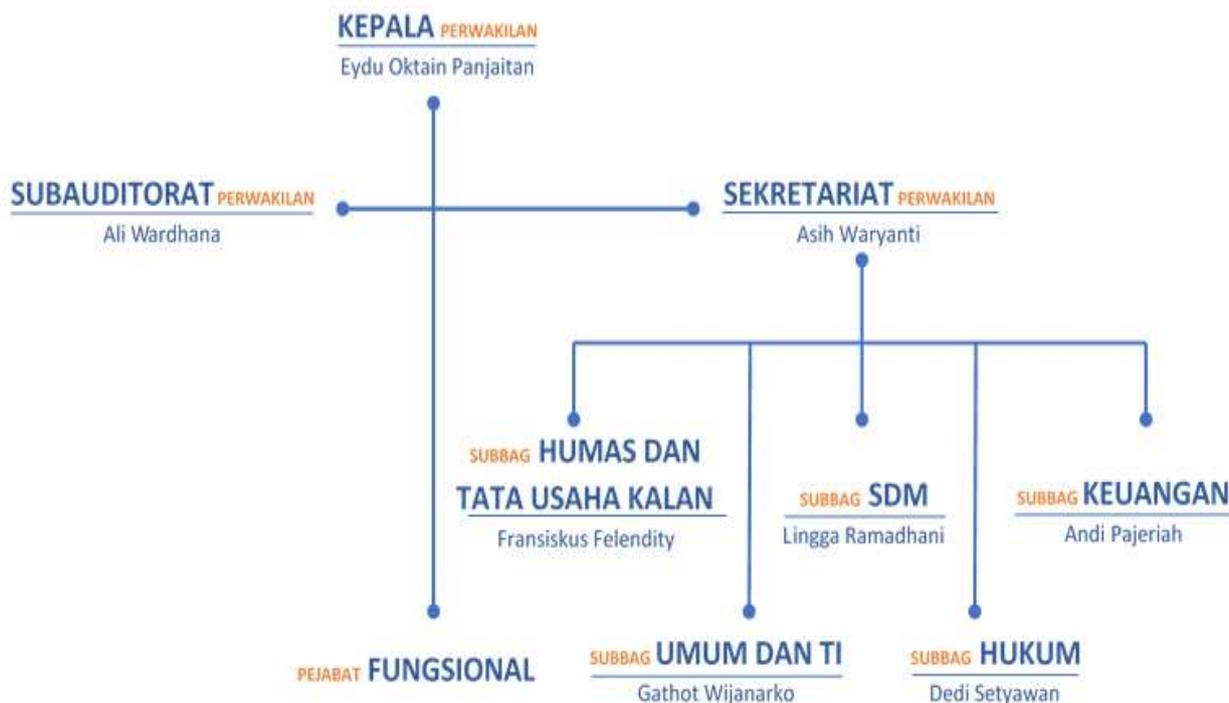
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Kab. Mamuju, Kab. Pasangkayu, Kab. Majene, Kab. Polewali Mandar, Kab. Mamasa, Kab. Mamuju Tengah serta lembaga terkait di lingkungan entitasnya, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh Auditama Keuangan Negara.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan fungsi antara lain perumusan dan pengevaluasian rencana aksi dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK.

C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat

Struktur Organisasi BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat setelah pemberlakuan Keputusan BPK RI Nomor 03/K/I-XIII.2/7/2014 tanggal 13 Juli 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, maka struktur organisasi BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menjadi seperti terlihat dalam diagram di bawah ini:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi BPK Perwakilan Sulawesi Barat



Struktur organisasi sesuai dengan Keputusan BPK RI Nomor 03/K/I-XIII.2/7/2014 tanggal 13 Juli 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan mulai efektif berlaku di BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun Anggaran 2015.

1. Sub Auditorat Sulawesi Barat

Sub Auditorat Sulawesi Barat mempunyai tugas:

- a. Pemeriksaan pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk merumuskan rencana kegiatan; mengusulkan tim pemeriksa; melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan; mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian Negara; menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan; mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK; pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK; melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa; memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan; menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Barat; serta
- c. Melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada Kepala Perwakilan.

2. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Barat. Sekretariat Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas:

a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, mengelola

perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran indikator kinerja utama unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, dan melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Sekretariat Perwakilan.

b. Subbagian Sumber Daya Manusia

Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan sumber daya manusia di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dan melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Sekretariat Perwakilan.

c. Subbagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, serta melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Sekretariat Perwakilan.

d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi

Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, dan melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Sekretariat Perwakilan.

e. Subbagian Hukum

Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan, dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, serta melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Sekretariat Perwakilan.

D. Sumber Daya BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat

Sumber Daya Manusia (SDM) pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 89 (Delapan Puluh Sembilan) orang dengan rincian sebagai berikut:

- 8 (delapan) orang pejabat struktural; Pejabat struktural terdiri dari:
 - 1 (satu) orang Kepala Perwakilan;
 - 1 (satu) orang Kepala Sekretariat Perwakilan;
 - 1 (satu) orang Kepala Sub Auditorat; dan
 - 5 (lima) orang Kepala Sub Bagian.
- 33 (tiga puluh tiga) orang pemeriksa;
- 31 (tiga puluh satu) orang non pemeriksa; dan
- 27 (dua puluh tujuh) orang pegawai kontrak.

Gambar 1.2
Pegawai dan Pejabat Struktural BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat



Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp15.958.436.000,00 yang terdiri dari anggaran pemeriksaan sebesar Rp4.790.419.000,00 dan anggaran non pemeriksaan sebesar Rp11.168.017.000. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp15.535.166.171 yang terdiri dari anggaran pemeriksaan sebesar Rp4.724.460.224 dan anggaran non pemeriksaan sebesar Rp10.810.705.947. Uraian penggunaan anggaran berdasarkan rencana kegiatan di BPK Perwakilan Sulawesi Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1: Alokasi Anggaran dan Realisasi TA 2019 BPK Perwakilan Sulawesi Barat

Anggaran Perwakilan 2019		Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa
		15,958,436,000	15,535,166,171	423,269,829
A. Pemeriksaan		4,790,419,000	4,724,460,224	65,958,776
a	LHP	4,429,441,000	4,393,636,878	35,804,122
b	Pamantauan	360,978,000	330,823,346	30,154,654
B. Nonpemeriksaan		11,168,017,000	10,810,705,947	357,311,053
a	Rumusan Bahan Pendapat	3,534,000	3,507,000	27,000
b	Layanan Administrasi Pemeriksaan	1,049,127,000	1,034,445,399	14,681,601
c	Sumbangan IHPS	101,634,000	100,922,295	711,705
d	Profil Entitas	9,460,000	7,194,000	2,266,000
e	Layanan Sekretariat	1,793,637,000	1,744,920,147	48,716,853
f	Layanan sarana dan prasarana internal	601,975,000	594,830,000	7,145,000
g	Layanan Perkantoran	7,608,650,000	7,324,887,106	283,762,894

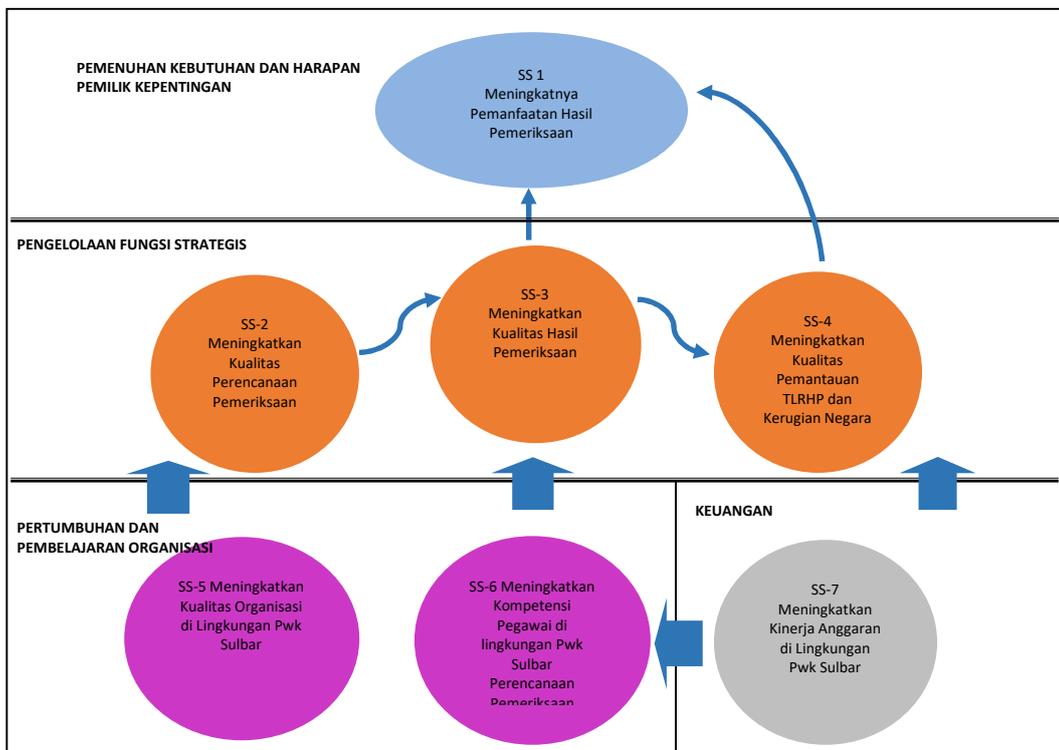


BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA (PKPK) BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT

A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat

Renstra 2016 – 2020 menetapkan visi, misi dan tujuan strategis BPK. Untuk mencapai tujuan strategis tersebut, BPK menetapkan 7 Sasaran Strategis (SS) yang digambarkan dalam bentuk peta strategis BPK Wide sebagai berikut:

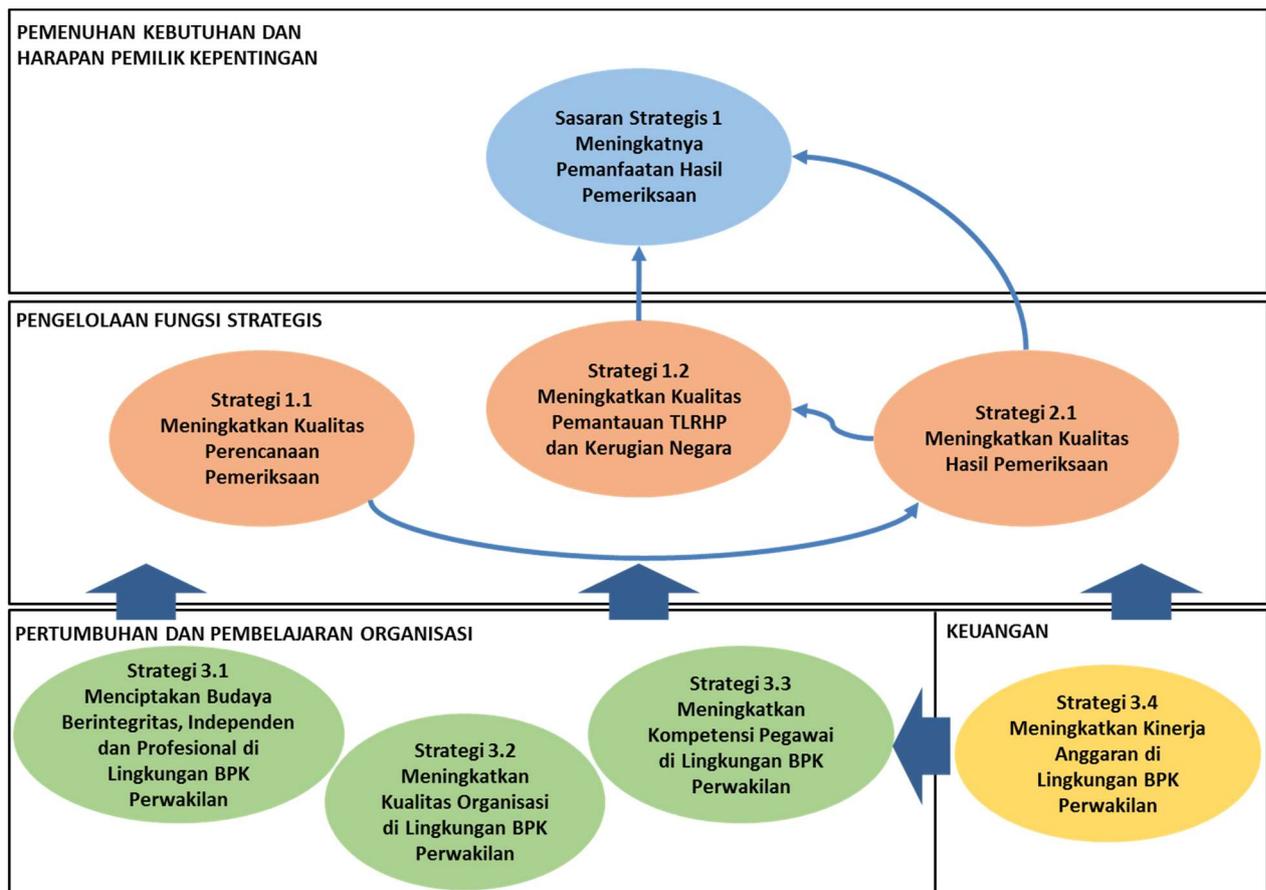
Gambar 2.1. BPK Wide



Pencapaian atas sasaran strategis BPK tersebut merupakan tanggung jawab Badan yang dibantu pelaksana tugas BPK, baik pelaksana teknis pemeriksaan, pelaksana penunjang, dan pelaksana pendukung. Salah satu pelaksana tugas BPK tingkat eselon I bidang teknis pemeriksaan adalah Auditorat Utama Keuangan Negara (Auditama KN) VI.

Sasaran strategis yang ditetapkan untuk Auditama KN VI sebanyak tujuh buah yaitu Meningkatkan Efektifitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan, Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat, Meningkatkan Mutu Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara, Meningkatkan Mutu Pengelolaan SDM di Lingkungan AKN VI, Meningkatkan Pemantauan TIK di Lingkungan AKN VI, dan Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran di Lingkungan AKN VI sebagaimana digambarkan pada peta strategis Eselon I sebagai berikut

Gambar 2.2. Peta Strategis AKN VI



Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis tersebut di atas, baik tingkat BPK Wide maupun level Eselon I perlu dilakukan transformasi sasaran strategis sampai tingkat satuan kerja. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu satuan kerja di bawah Auditama KN VI memiliki peranan strategis dalam menunjang terwujudnya sasaran strategis Auditama KN VI yaitu dengan berusaha meningkatkan pemanfaatan hasil pemeriksaan, meningkatkan kualitas perencanaan pemeriksaan, meningkatkan kualitas pemantauan TLRHP dan kerugian Negara, meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan, menciptakan budaya berintegritas, independen dan professional di lingkup BPK perwakilan, meningkatkan kualitas organisasi BPK Perwakilan, meningkatkan kompetensi pegawai di lingkungan BPK perwakilan dan meningkatkan kinerja anggaran di lingkungan BPK Perwakilan

B. Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat

Dalam rangka mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target pencapaian IKU yang dituangkan dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Barat selaku Eselon II. Berikut Sasaran Strategis, IKU dan Target pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019:



Tabel 1.2
Target pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019

Strategi	Indikator Kinerja	Target	
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
	IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH	100%
	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%
	IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1
Strategi 1.1 - Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	95%
	IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	30%
	IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100%
Strategi 1.2 - Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%
	IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	14
	IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%
Strategi 2.1 - Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%
	IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,9
	IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%
	IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100%
Strategi 3.1 - Terciptanya Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	5,0
	IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,0
	IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%
Strategi 3.2 - Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	AA
	IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%
	IK 3.2.3	Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	1
	IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	100%
	IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%
	IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	88%
	IK 3.2.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2
Strategi 3.3 - Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%
	IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%
Strategi 3.4 - Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	80%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA (EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT)

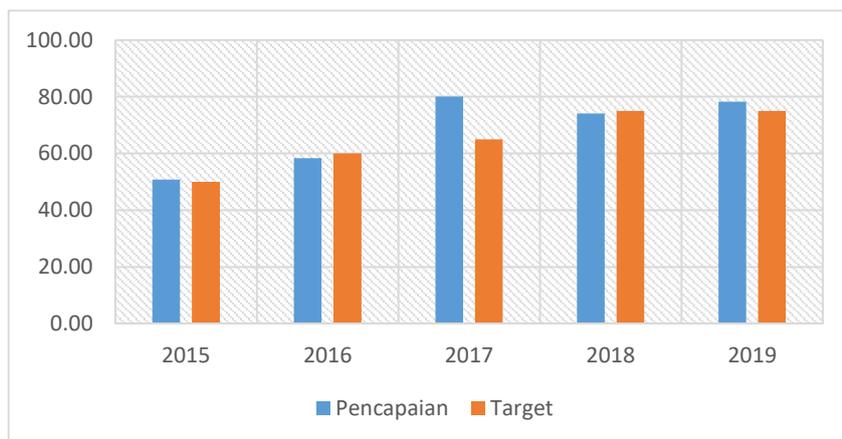
Capaian kinerja dalam bentuk IKU diinput dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja (SIMAK) dan menghasilkan nilai atau skor kinerja. Pencapaian skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 adalah sebesar 101,29. Rincian target, capaian, dan skor kinerja Tahun 2019 berdasarkan hasil input IKU pada aplikasi PRISMA adalah sebagai berikut:

SS.1 Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan

Upaya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat untuk meningkatkan pemanfaatan hasil pemeriksaan diukur dengan 4 (empat) indikator utama. Secara keseluruhan pencapaian SS.1 telah memenuhi semua target yang ditetapkan. Skor pencapaian target SS.1 sebesar 101,32. Dengan rincian sebagai berikut:

- IKU 1.1, Target Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan tahun 2019 sebesar 75% dan terealisasi sebesar 78,22%. Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti mengalami kenaikan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, Grafik perkembangan realisasi IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 3.1
Grafik perkembangan realisasi IKU 1.1



Dalam mendorong penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat senantiasa berkoordinasi dengan entitas untuk membahas rencana aksi (*action plan*) atas pelaksanaan

tindak lanjut dan mengingatkan batas waktu penyelesaian tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Gambar 3.2
Pemantauan Tidak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada
Entitas di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat



- IKU 1.2, Target Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2019 adalah 100% sementara realisasi sampai dengan tahun 2019 sebesar 100%. Pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat tidak terdapat temuan yang berindikasi tindak pidana yang disampaikan ke Aparat Penegak Hukum. Hasil penelaahan Sub Bagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat terhadap hasil temuan pemeriksaan disimpulkan bahwa unsur pada hasil pemeriksaan belum mendukung untuk dikategorikan sebagai Temuan Berindikasi Tindak Pidana.
- IKU 1.3: Target Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian keterangan Ahli di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2019 adalah 100% dengan realisasi sampai dengan tahun 2019 sebesar 100%.
- IKU 1.4: Jumlah bahan pendapat dan pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang. Pendapat merupakan masukan BPK yang sewaktu-waktu dapat disampaikan kepada pemerintah. Pada tahun 2019, realisasi IKU 1.4 mencapai target yang ditetapkan. Target Jumlah Usulan Pendapat Yang Dimanfaatkan Dit. EPP sebanyak 1 usulan dan terealisasi sebanyak 1 usulan. Usulan Pendapat ini telah dikirimkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan Nota Dinas Kepala Perwakilan Sulawesi Barat tentang Usulan Rumusan Bahan Pendapat dari BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dengan judul "**Pemberian**

Tambahan Penghasilan Pegawai dan jasa Pelayanan Kesehatan (Medik) Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang Bekerja Pada Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (PUSKESMAS) Pada Pemerintah Daerah Di Lingkungan Sulawesi Barat". Usulan Pendapat BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat tersebut diterima oleh EPP sesuai dengan Nota Dinas Kepala Direktorat EPP No. 234/ND/XII.2/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 perihal Penyampaian Tanggapan atas Usulan Bahan Pendapat

SS.1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan

Upaya Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat BPK RI untuk meningkatkan kualitas perencanaan pemeriksaan diukur dengan tiga indikator utama yaitu: IKU 1.1.1 Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan, IKU 1.1.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP dan IKU 1.1.3 Tingkat Evaluasi LHP. Secara keseluruhan pencapaian Sasaran Strategis ini mendapatkan score 103,64 dengan rincian sebagai berikut;

- IKU 1.1.1 Tingkat Implementasi Strategi pemeriksaan. IKU ini mengukur kualitas perencanaan yang ditunjukkan dari konsistensi pelaksanaan pemeriksaan dibandingkan dengan rencana pemeriksaan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP). Target IKU ini di Lingkungan BPK Perwakilan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2019 adalah sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%.IKU
- 1.1.2 Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP. IKU ini menunjukkan tingkat proporsi kegiatan pemeriksaan kinerja yang ditunjukkan oleh adanya peningkatan jumlah LHP pemeriksaan kinerja terhadap jumlah seluruh LHP yang dihasilkan. Target Jumlah LHP Kinerja Yang Diterbitkan terhadap seluruh LHP Pemeriksaan di Lingkungan BPK Perwakilan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2019 adalah 30% dengan realisasi sampai dengan tahun 2019 sebesar 46,15% atau sebanyak 6 Laporan hasil pemeriksaan kinerja yang diterbitkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat yakni pemeriksaan Kinerja atas Peranan Pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 Terhadap Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dan Instansi Terkait Lainnya, Kinerja Peningkatan Kualitas Pembelajaran dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018 dan 2018/2019 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Instansi Terkait Lainnya, Kinerja Peningkatan Kualitas Pembelajaran dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018 dan 2018/2019 pada Pemerintah

Kabupaten Mamuju dan Instansi Terkait Lainnya, Kinerja Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Majene dan Instansi Terkait Lainnya, Kinerja Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dan Instansi Terkait Lainnya, dan Kinerja Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan Instansi Terkait Lainnya.

- IKU 1.1.3 Target Evaluasi LHP. Target IKU ini di Lingkungan Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2019 adalah sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%.

SS.1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara/Daerah

Sesuai tugas dan wewenang nya, BPK harus dapat menjamin dan menilai kualitas pemantauan TLRHP dan efektivitas penyelesaian ganti kerugian Negara baik dari sisi jangka waktu maupun nilai ganti kerugian. Melalui Sasaran Strategis ini, cakupan entitas yang dipantau diharapkan meningkat yang pada akhirnya meningkatkan jumlah besaran ganti kerugian Negara.

Kualitas pemantauan TLRHP dan penyelesaian kerugian Negara diukur dengan tiga Indikator kinerja yakni: IKU 1.2.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. IKU ini bertujuan untuk mengukur pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat diperiksa. Pemutakhiran ini akan di rekapitulasi untuk digunakan sebagai salah satu bahan untuk menyusun IHPS. IKU 1.2.2 Jumlah Laporan Pemantauan Kerugian Negara/Daerah Yang Diterbitkan. IKU ini bertujuan untuk mengukur kinerja Auditorat/Perwakilan dalam melakukan pemantauan penyelesaian ganti kerugian Negara/Daerah sehingga efektivitas penyelesaian ganti kerugian Negara/Daerah baik dari sisi jangka waktu penyelesaian maupun ganti rugi dapat tercapai. IKU 1.2.3: Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Kerugian Negara/Daerah. IKU ini bertujuan untuk mengukur kinerja penyampaian laporan penyelesaian ganti kerugian negara, khususnya melalui SIKAD agar tepat waktu. Pada tahun 2019, realisasi IKU ini telah mencapai 100% dari target yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

- IKU 1.2.1, Target Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah 100% dan terealisasi sebesar 100%. Target ini dapat tercapai melalui strategi pemantauan kerugian Negara/Daerah yang dibarengi dengan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, sehingga data tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat dimutakhirkan secara konsisten dan akurat.

- IKU 1.2.2, Target Jumlah Laporan Pemantauan Kerugian Negara Yang Diterbitkan sebanyak 14 laporan dan terealisasi 14 laporan. Pencapaian target ini diperoleh dari hasil kegiatan pemantauan kerugian Negara/Daerah yang dilaksanakan setiap semester, sehingga dapat diterbitkan Laporan Pemantauan Kerugian Negara untuk 7 (tujuh) entitas Pemerintah Daerah di Sulawesi Barat masing-masing sebanyak 2 (dua) laporan per tahun.
- IKU 1.2.3 Target Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Kerugian Negara/Daerah adalah 100% dan terealisasi sebesar 100%. Database tindak lanjut hasil pemeriksaan yang mutakhir dan pemanfaatan lembar monitoring proses pemantauan kerugian Negara/Daerah merupakan faktor yang membuat ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan kerugian Negara/Daerah dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

SS. 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan

- IKU 2.1.1 Pemenuhan Quality Control (QC) dan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan. Target Pemenuhan QC dan QA Pemeriksaan di Lingkungan Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2019 adalah 100% dengan realisasi sampai dengan triwulan IV tahun 2019 sebesar 100%
- IKU 2.1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK. Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK. IKU ini menunjukkan Indikator tingkat kepuasan auditee atas kinerja pemeriksa AKN dalam menerapkan nilai-nilai dasar organisasi BPK, yang diukur berdasarkan persepsi auditee melalui survei tingkat kepuasan dimana dimensi yang menjadi ukuran mencakup nilai integritas, independensi dan profesionalisme. IKU ini bertujuan untuk mengukur kinerja pemeriksa melalui aspek perilaku dan kualitas yang dipraktikkan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan. Nilai akumulasi yang diperoleh berdasarkan hasil survey yang disebar ke 7 entitas terperiksa menunjukkan hasil yang positif yakni 4,71 dimana target pada tahun 2019 hanya 3,90. Hasil tersebut tak lepas dari upaya penciptaan lingkungan kerja di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat yang mendukung implementasi dari nilai-nilai dasar BPK RI, baik melalui penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai, jaminan kesejahteraan yang memadai, dan penciptaan komunikasi kerja yang transparan dan bertanggung jawab.
- IKU 2.1.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP. IKU ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pemeriksaan melalui pengukuran terhadap ketepatan waktu penyampaian LHP kepada entitas/stakeholder. Target Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP di Lingkungan Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi

Barat pada tahun 2019 adalah sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%. Pemanfaatan teknologi informasi seperti e-mail dan media sosial menjadi faktor pendukung ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemeriksaan sehingga LHP dapat disampaikan kepada entitas/stakeholder secara tepat waktu.

Gambar 3.3
Penyerahan LHP LKPD Provinsi Sulawesi Barat



Gambar 3.4
Penyerahan LHP Kinerja dan LHP atas Penyelesaian Kerugian Daerah di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat



- IKU 2.1.4 Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK. Target IKU ini di Lingkungan Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2019 adalah sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%.

SS.3.1 Meningkatkan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan

- IKU 3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK. IKU ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survey. IKU ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK. IKU ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi misi dan nilai dasar BPK. Target IKU ini di lingkungan Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2019 adalah sebesar 5,00 dan terealisasi sebesar 4,66.
- IKU 3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK. IKU ini mengukur tingkat penerapan nilai-nilai dasar BPK sebagai budaya organisasi oleh seluruh komponen BPK. IKU ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana Nilai dasar BPK diterapkan dalam organisasi. Targe IKU ini di lingkungan Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2019 adalah sebesar 5,00 dan terealisasi sebesar 4,76
- IKU 3.1.3 Tingkat Kepatuhan Pegawai Terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin. Kode Etik Pegawai merupakan kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK No. 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan. Sementara itu, disiplin pegawai merupakan kedisiplinan sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. IKU ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pegawai BPK terhadap kode etik dan peraturan terkait kedisiplinan pegawai. Targe IKU ini di lingkungan Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2019 adalah sebesar 100% namun terealisasi hanya sebesar 98.59%.

SS.3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan

Peningkatan kualitas organisasi di lingkungan perwakilan merupakan salah satu target Renstra yang harus diperhatikan oleh setiap perwakilan. Dalam rangka mendorong tingkat kualitas organisasi yang semakin baik di lingkungan perwakilan maka dirumuskanlah 7 (tujuh) target IKU yang diharapkan mampu mendorong kualitas organisasi semakin baik, secara umum pencapaian IKU ini mendapatkan nilai sebesar 99.45, adapun target IKU tersebut antara lain:

- IKU 3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan. Evaluasi AKIP merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh satker di BPK. IKU ini bertujuan untuk mendorong peningkatan AKIP di seluruh satker. Sesuai Permen RB Nomor 12 tahun 2015, nilai AKIP dikategorikan sebagai berikut:

1. AA = Sangat Memuaskan (>90-100)
2. A = Memuaskan (>80-90)
3. BB = Sangat Baik (>70-80)
4. B = Baik (>60-70)
5. CC = Cukup (>50-60)
6. C = Kurang (>30-50)
7. D = Sangat Kurang (0-30)

Target Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan untuk tahun anggaran 2019 adalah **AA**, dengan realisasi sampai dengan tahun 2019 adalah **A**. Berdasarkan hasil evaluasi itama BPK Perwakilan Sulawesi Barat mendapatkan nilai **86,68** dengan predikat Sangat Baik. Hasil evaluasi tersebut lebih baik dari hasil evaluasi itama pada tahun sebelumnya yakni hanya mendapat skor **BB** dengan nilai **79,77**.

- IKU 3.2.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi. IKU ini bertujuan untuk mendorong satker agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. BPK melalui biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (*email, eDrive*), layanan aplikasi SISDM dan layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, eAudit). Adapun target tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi Perwakilan BPK Sulbar pada tahun 2019 adalah 95% dengan akumulasi pencapaian sebesar 98,31%.
- IKU 3.2.3 Persentase Penyusunan *Best Practice* Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2019 adalah 100% dengan target sebesar 100%. Realisasi sampai dengan tahun 2019 sebesar 100%. Pada tahun 2019 BPK Perwakilan Sulawesi Barat telah menyampaikan *Best Practice* dengan judul "**Pembuatan Bank Data Pemeriksaan Sebagai Solusi untuk Melakukan Integritasi Database Pemeriksaan**" sesuai dengan Nota Dinas Perwakilan NO.272/ND/XIX.MAM/09/2019 atas pengusulan tersebut telah diterima dan memenuhi kriteria sebagai *Innovative Practice* sehingga dapat diakui sebagai capaian IKU sebagaimana dicantumkan dalam Nota Dinas Kepala Direktorat PSMK No 625/ND/XII.1/12/2019
- IKU 3.2.4 Persentase Penerapan *Best Practice* Sulawesi Barat pada tahun 2019 adalah 100% dengan target sebesar 100%. Realisasi sampai dengan tahun 2019 sebesar 100%. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2019 melakukan replikasi *Best Practice* "**Percepatan Penyerahan LHP Atas LKPD**" sesuai dengan nota dinas Kepala Perwakilan No.268/ND/XIX.MAM/09/2019.

- IKU 3.2.5 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja. IKU ini bertujuan untuk mendorong unit kerja untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja, Laporan Triwulanan dan Laporan Bulanan secara tepat waktu. Target persentase ketepatan waktu penyampaian laporan ini di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2019 adalah 100%, dengan realisasi sampai dengan tahun 2019 sebesar 100%. Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 telah disampaikan secara tepat waktu.
- IKU 3.2.6 Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana kerja merupakan pedoman yang menjadi acuan dalam perencanaan, pengadaan, pendistribusian, serta penataan sarana dan prasarana kerja di lingkungan BPK, untuk terwujudnya suatu pengelolaan sarana dan prasarana kerja yang efektif dan efisien dalam rangka menunjang pelaksanaan dan kelancaran tupoksi di BPK. Target Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2019 adalah 83,00% dengan realisasi sampai dengan tahun 2019 sebesar 88,18%.
- IKU 3.2.7 Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan. Target Jumlah Media *Relation* yang dilaksanakan di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2019 adalah 100% dengan realisasi sampai dengan realisasi tahun 2019 sebesar 100%. IKU ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan BPK RI, memperoleh dukungan dari media massa dalam menyebarkan hasil pemeriksaan BPK RI secara jelas dan akurat kepada masyarakat, dan meningkatkan hubungan yang harmonis dan saling mendukung dengan media massa. BPK Perwakilan Sulawesi barat telah melakukan Media Workshop pada tahun 2019 dengan tema “**Pemahaman Tentang Tugas dan Fungsi BPK dan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2018**”

Gambar 3.5
Penyelenggaraan Media *Workshop*

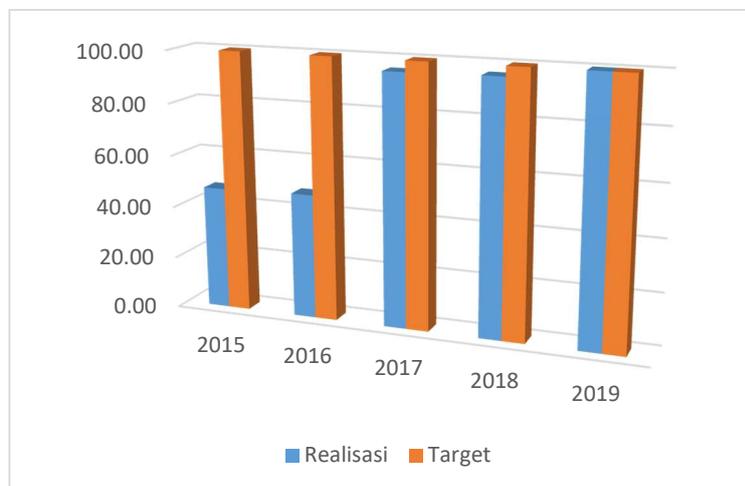


SS.3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan

Peningkatan mutu hasil pemeriksaan sangat didukung dengan peningkatan mutu SDM pada masing-masing perwakilan. Untuk meningkatkan mutu pengelolaan SDM rata-rata jam pelatihan per pegawai sebaiknya melampaui atau minimal sama dengan target yang telah ditetapkan dan hal ini berlaku bagi seluruh pegawai dan pemeriksa. Pada tahun 2019, Realisasi IKU 3.3.1 dan 3.3.2 telah mencapai target yang ditetapkan berikut rinciannya.

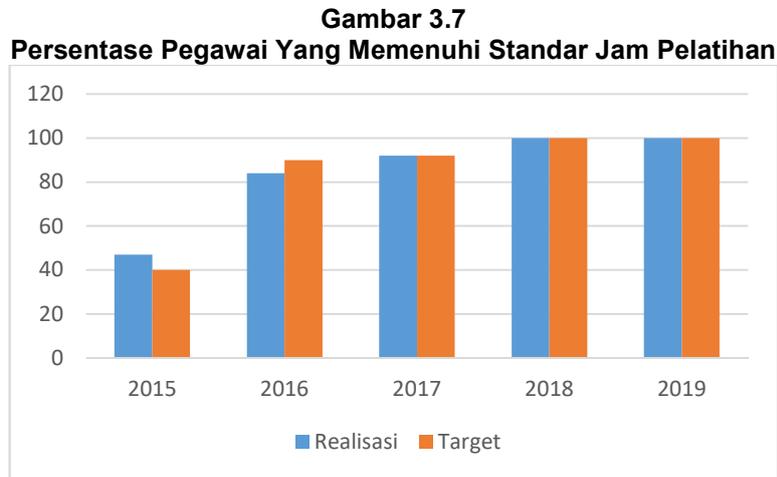
- IKU 3.3.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa. IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan unit/satuan kerja dalam melaksanakan standar pemeriksaan terkait dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan bagi pemeriksa yang melaksanakan tugas pemeriksaan. Target IKU ini pada tahun 2019 sebesar 100% dan telah terealisasi sebesar 100%. Perkembangan realisasi IKU 3.3.1 Persentase Pemeriksa Yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan sejak tahun 2016 sampai dengan 2016 cenderung meningkat, seperti terlihat pada grafik berikut:

Gambar 3.6
Persentase Pemeriksa Yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan



IKU 3.3.2 Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/manajerial (non pemeriksa). Untuk memenuhi tujuan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di berbagai lini organisasi BPK, setiap pegawai dipersyaratkan untuk diberikan pendidikan/pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh pegawai yang bersangkutan. Sebagaimana PFP (pemeriksa), pegawai non pemeriksa, yakni staf maupun pejabat struktural pada lingkup AKN dipersyaratkan untuk memelihara kompetensi sesuai bidang tugas yang menjadi

tanggung jawabnya. Target IKU 3.3.2 pada tahun 2019 adalah 100% dengan realisasi sebesar 100%. Perkembangan realisasi IKU 3.3.2 Persentase yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 bisa dilihat pada grafik berikut:



SS.3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan

Pada tahun 2019 target kinerja implementasi anggaran di lingkungan BPK perwakilan Sulawesi Barat sebesar 100%. Target IKU 3.4.1 pada tahun 2019 adalah sebesar 80% dimana realisasi yang diperoleh sebesar 85,26%. Indikator kinerja ini diukur dengan tiga kriteria antara lain: penyerapan anggaran dengan skor kinerja sebesar 97,06%, konsistensi antara perencanaan dan implementasi dengan skor kinerja sebesar 99,63%, pencapaian keluaran sebesar 99,58% dan efisiensi sebesar 50,33%

Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp15.958.436.000,00 yang terdiri dari anggaran pemeriksaan sebesar Rp4.790.419.000,00 dan anggaran non pemeriksaan sebesar Rp11.168.017.000. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp15.535.166.171 yang terdiri dari anggaran pemeriksaan sebesar Rp4.724.460.224 dan anggaran non pemeriksaan sebesar Rp10.810.705.947

BAB IV PENUTUP

LAK BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat ini merupakan sumbangan penyusunan LAK AKN VI BPK RI sebagai perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja, baik keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai misi dan visi dalam rangka terselenggaranya good governance yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme.

Secara umum, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat mengalami penurunan dalam pencapaian skor kinerja. Hal ini terlihat dari pencapaian skor kinerja yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah mencapai 98,67% sedangkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan dengan hasil pencapaian nilai IKU sebesar 101,29%.Meski demikian masih terdapat IKU Perwakilan yang belum mencapai target antara lain:

1. IKU 3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi dan Misi BPK.
2. IKU 3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK
3. IKU 3.1.3 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin
4. IKU 3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Perwakilan

Hal-hal yang mempengaruhi tidak tercapainya keempat IKU di atas, adalah:

1. Indeks pemahaman pegawai terhadap visi dan misi BPK dan indeks implementasi nilai dasar BPK diukur dari jumlah kuisioner yang telah dibagikan ke masing-masing pegawai BPK di perwakilan secara acak. Tabulasi dari kuisioner tersebut kemudian menjadi dasar penilaian terkait pemahaman pegawai terhadap visi dan misi BPK serta implementasi nilai dasar BPK. Dari keseluruhan jawaban responden pada perwakilan Sulawesi Barat skor yang bisa didapatkan hanya sebanyak 4,66 untuk pemahaman visi dan misi BPK dan 4,76 untuk implementasi nilai dasar BPK.
2. Terdapat satu pegawai di lingkup BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat yang dinyatakan melanggar disiplin/kode etik BPK
3. Hasil Evaluasi Itama yang hanya memperoleh penilaian A dari target perwakilan senilai AA.

Agar dapat memenuhi target di masa mendatang, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat akan menjalankan beberapa alternatif sebagai berikut:

1. Melakukan perbaikan dan mengikuti instruksi ITAMA sebagaimana tercantum dalam laporan evaluasi akuntabilitas perwakilan dalam rangka perbaikan akuntabilitas kinerja perwakilan.
2. Memperkuat pemahaman visi dan misi BPK dilingkup perwakilan Sulawesi Barat serta menekankan kepada pegawai dalam lingkup BPK terkait pentingnya implementasi nilai dasar BPK dalam lingkup perwakilan BPK Sulawesi Barat.
3. Berkoordinasi dengan para Kasubbag dalam rangka mendorong pegawai baik pemeriksa maupun non pemeriksa untuk senantiasa menjunjung tinggi kode etik dan peraturan disiplin yang ada dalam lingkup Badan Pemeriksa Keuangan.

Penyusunan LAK BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat ini diharapkan dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan maupun untuk penetapan kebijakan oleh pimpinan BPK.



INDEPENDENSI – INTEGRITAS – PROFESIONAL

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT**

INDIKATOR KINERJA DAN ANGGARAN 2019

Strategi	Anggaran	Indikator Kinerja	
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	Rp1.850.522.000,00	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
		IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH
		IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli
		IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang
Strategi 1.1 - Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	Rp3.255.533.000,00	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan
		IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP
		IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP
Strategi 1.2 - Meningkatnya Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	Rp1.232.798.000,00	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
		IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara
		IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang
Strategi 2.1 - Meningkatnya Kualitas Hasil Pemeriksaan	Rp3.093.221.000,00	IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan
		IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK
		IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP
		IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK
Strategi 3.1 - Terciptanya Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan	Rp1.628.585.000,00	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK
		IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK
		IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin
Strategi 3.2 - Meningkatnya Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	Rp3.198.158.000,00	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja
		IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
		IK 3.2.3	Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun
		IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>
		IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja
		IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana
		IK 3.2.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan
Strategi 3.3 - Meningkatnya Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan	Rp818.913.000,00	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa
		IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)
Strategi 3.4 - Meningkatnya Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan	Rp125.137.000,00	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA**

Satuan Kerja : Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Barat
Tahun Anggaran : 2019

Strategi	Indikator Kinerja		Target	Realisasi
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	78,11%
	IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH	100%	100%
	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%
	IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1
Strategi 1.1 - Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	95%	100%
	IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	30%	46,15
	IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100%	100%
Strategi 1.2 - Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%
	IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	14	14
	IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%
Strategi 2.1 - Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%	100%
	IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,9	4,71
	IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%
	IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100%	100%
Strategi 3.1 - Terciptanya Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	5,0	4,66
	IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,0	4,76
	IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	98,59
Strategi 3.2 - Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	AA	A
	IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	98,31
	IK 3.2.3	Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	1	1
	IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	100%	100%
	IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%	100%
	IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	88%	88,18%
	IK 3.2.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2	5,00
Strategi 3.3 - Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%
	IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	100%
Strategi 3.4 - Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	80%	85,26%

**PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN TAHUN PELAPORAN
DENGAN CAPAIAN TIGA TAHUN TERAKHIR**

Indikator Kinerja		Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2017
IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	78,22%	74,13%	80,00%
IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100,00%	100%
IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	100%
IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1	1
IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	90%	100%	100%	N/A
IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	30%	46,15%	25%	25%
IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	80%	100%	100%	N/A
IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%
IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	14	14	14	14
IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	100%
IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%
IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,9	4,71	4,61	4,67
IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%	100%
IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100%	100%	100%	100%
IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	5	4,66	3,8	N/A
IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5	4,76	4,41	N/A
IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	98,59	100%	N/A
IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	AA	A	BB	A
IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	98,31%	95,37%	95%
IK 3.2.3	Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	1	1	1	N/A
IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	1	1	1	N/A
IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%	100%	100%	100%
IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	88%	88,18%	88%	88%
IK 3.2.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2	5	5,8	2,4
IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	96%	96%
IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	100%	100%	92%
IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	80%	85,26%	80,17%	83,00%

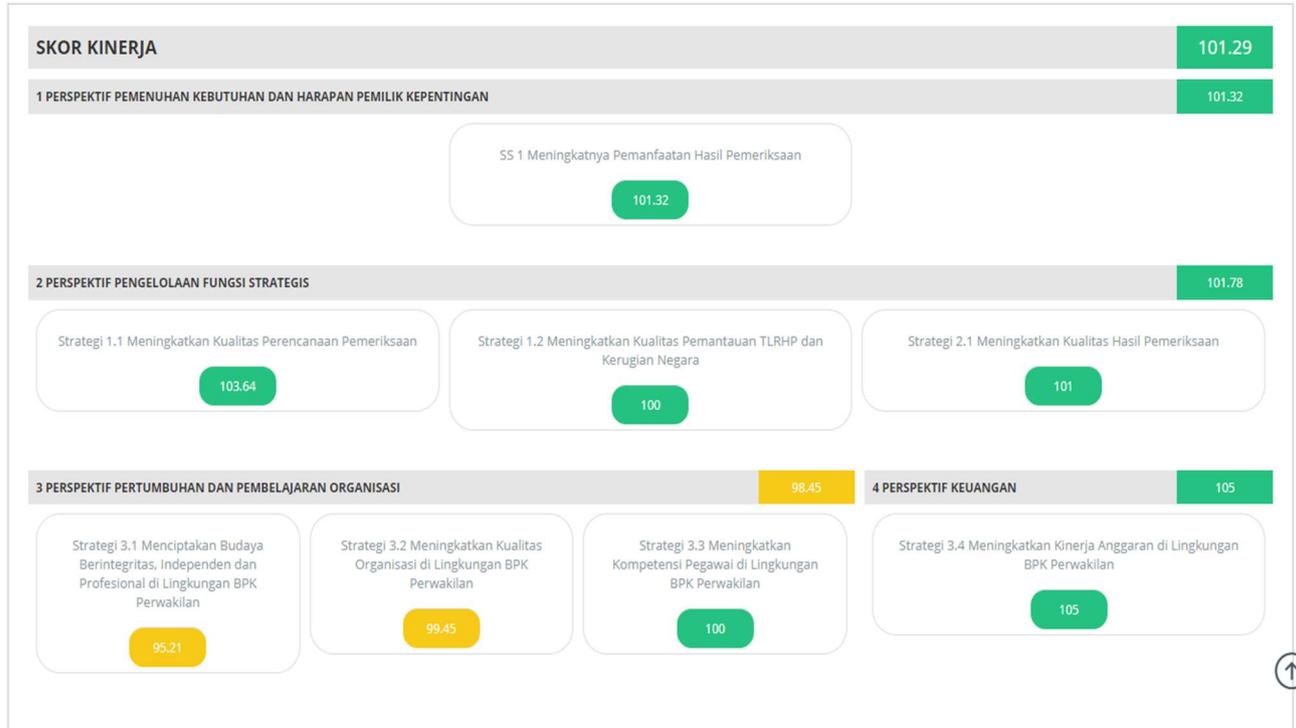
INDIKATOR KINERJA DAN ANGGARAN 2019

Strategi	Anggaran Rinci	Anggaran	Indikator Kinerja	
Sasaran Strategis 1 Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	Rp 343,397,000	Rp 1,275,115,000	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
	Rp 312,150,000		IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH
	Rp 616,004,000		IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli
	Rp 3,534,000		IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang
Strategi 1.1 - Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	Rp 749,737,000	Rp 4,465,765,000	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan
	Rp 3,024,496,000		IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP
	Rp 691,532,000		IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP
Strategi 1.2 - Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	Rp 523,557,000	Rp 1,303,676,000	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
	Rp 465,071,000		IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara
	Rp 312,045,000		IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang
Strategi 2.1 - Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	Rp 1,235,162,000	Rp 2,833,058,000	IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan
	Rp 524,378,000		IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK
	Rp 526,163,000		IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP
	Rp 547,385,000		IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK
Strategi 3.1 - Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan	Rp 730,259,000	Rp 1,729,062,000	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK
	Rp 665,604,000		IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK
	Rp 333,199,000		IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin
Strategi 3.2 - Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	Rp 536,291,000	Rp 3,346,926,000	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Utama atas Akuntabilitas Kinerja
	Rp 659,127,000		IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
	Rp 410,787,000		IK 3.2.3	Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun
	Rp 371,993,000		IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>
	Rp 251,009,000		IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja
	Rp 577,340,000		IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Strategi 3.3 - Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan	Rp 600,947,000	Rp 867,953,000	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa
	Rp 267,036,000		IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)
Strategi 3.4 - Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan	Rp 136,821,000	Rp 136,821,000	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran

Satuan Kerja **BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat**

Periode **DES / TW 4 / SEM 2 / TAHUN / 2019**

Peta Strategi [Detail Scorecard](#)



Satuan Kerja **BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat**

Periode **DES / TW 4 / SEM 2 / TAHUN / 2019**

Peta Strategi [Detail Scorecard](#)

Nama	Jenis	Periode	Target PK	Target	Realisasi	Score
↳ BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat	Scorecard	Triwulanan				101.29 ●
↳ 1 PERSPEKTIF PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN HARAPAN PEMILIK KEPENTINGAN	Perspektif	Triwulanan				101.32 ●
↳ SS 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	Sasaran Strategis	Triwulanan				101.32 ●
↳ 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	IKU	Triwulanan	75,00%	75,00%	78,22 %	104.29 ●
1.1.1 Jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti	Sub IKU	Triwulanan			1.215,00	●
1.1.2 Jumlah rekomendasi yang belum selesai/masih dalam proses ditindaklanjuti	Sub IKU	Triwulanan			298,00	●
1.1.3 Jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti	Sub IKU	Triwulanan			42,00	●
1.1.4 Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti	Sub IKU	Triwulanan			6,00	●
1.1.5 Jumlah rekomendasi yang telah disampaikan ke auditee	Sub IKU	Triwulanan			1.561,00	●
↳ 1.2 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	IKU	Triwulanan	100,00%	100,00%	100,00 %	100 ●
1.2.1 Jumlah temuan pemeriksaan yg dinyatakan memenuhi syarat sbg temuan berindikasi pidana oleh Auditorat Utama Investigasi	Sub IKU	Triwulanan				●
1.2.2 Jumlah temuan pemeriksaan yg berindikasi pidana yg diserahkan ke Auditorat Utama Investigasi	Sub IKU	Triwulanan				●
↳ 1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	IKU	Triwulanan	100,00%	100,00%	101,00 %	101 ●
1.3.1 Jumlah LHP PKN yang disampaikan ke IPH	Sub IKU	Triwulanan			1,00	●
1.3.2 Jumlah permintaan sebagai ahli yang dipenuhi	Sub IKU	Triwulanan				●
1.3.3 Jumlah permintaan PKN	Sub IKU	Triwulanan			1,00	●
1.3.4 Jumlah permintaan sebagai ahli	Sub IKU	Triwulanan				●
1.4 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	IKU	Triwulanan	1,00	1,00	1,00	100 ●

▼ 2 PERSPEKTIF PENGELOLAAN FUNGSI STRATEGIS	Perspektif	Triwulanan					101.78	●
▼ Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	Sasaran Strategis	Triwulanan					103.64	●
▼ 1.1.1 Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	IKU	Triwulanan	95,00%	95,00%	100,00 %		105	●
1.1.1.1 Kesesuaian antara RKP dan Renstra	Sub IKU	Triwulanan			100,00 %			●
1.1.1.2 Kesesuaian antara AO dan TSAO (termutakhir)	Sub IKU	Triwulanan			100,00 %			●
▼ 1.1.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	IKU	Triwulanan	30,00%	30,00%	46,15 %		105	●
1.1.2.1 Jumlah LHP Keuangan	Sub IKU	Triwulanan				7,00		●
1.1.2.2 Jumlah LHP Kinerja	Sub IKU	Triwulanan				6,00		●
1.1.2.3 Jumlah LHP DTT (non-Banpol)	Sub IKU	Triwulanan						●
1.1.2.4 Jumlah LHP DTT (Banpol)	Sub IKU	Triwulanan				7,00		●
1.1.3 Tingkat Evaluasi LHP	IKU	Triwulanan	100,00%	100,00%	100,00 %		100	●
▼ Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	Sasaran Strategis	Triwulanan					100	●
▼ 1.2.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	IKU	Triwulanan	100,00%	100,00%	100,00 %		100	●
1.2.1.1 Jumlah laporan Pemantauan TLRHP yang mutakhir	Sub IKU	Triwulanan				14,00		●
1.2.1.2 Jumlah entitas pemantauan TLRHP	Sub IKU	Triwulanan				7,00		●
1.2.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	IKU	Triwulanan	14,00	14,00	14,00		100	●
▼ 1.2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	IKU	Triwulanan	100,00%	100,00%	100,00 %		100	●
1.2.3.1 Jumlah laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara yang disampaikan tepat waktu	Sub IKU	Triwulanan				14,00		●
1.2.3.2 Jumlah laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara yang disampaikan	Sub IKU	Triwulanan				14,00		●

▼ Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	Sasaran Strategis	Triwulanan					101	●
▼ 2.1.1 Pemenuhan Quality Control (QC) dan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan	IKU	Triwulanan	100,00%	100,00%	100,00 %		100	●
2.1.1.1 Persentase Pemenuhan QC atas setiap kegiatan pemeriksaan	Sub IKU	Triwulanan				1.300,00 %		●
2.1.1.2 Persentase Pemenuhan QA atas setiap kegiatan pemeriksaan	Sub IKU	Triwulanan				1.300,00 %		●
2.1.1.3 Jumlah kegiatan pemeriksaan	Sub IKU	Triwulanan				13,00		●
2.1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	IKU	Triwulanan	3,90	3,90	4,71		105	●
▼ 2.1.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	IKU	Triwulanan	100,00%	100,00%	100,00 %		100	●
2.1.3.1 LHP keuangan yg diterbitkan tepat waktu	Sub IKU	Triwulanan				7,00		●
2.1.3.2 LHP keuangan yg diterbitkan	Sub IKU	Triwulanan				7,00		●
2.1.3.3 LHP kinerja yg diterbitkan tepat waktu	Sub IKU	Triwulanan				6,00		●
2.1.3.4 LHP kinerja yg diterbitkan	Sub IKU	Triwulanan				6,00		●
2.1.3.5 LHP DTT (non-banpol) yg diterbitkan tepat waktu	Sub IKU	Triwulanan						●
2.1.3.6 LHP DTT (non-banpol) yg diterbitkan	Sub IKU	Triwulanan						●
2.1.3.7 LHP DTT (banpol) yg diterbitkan tepat waktu	Sub IKU	Triwulanan				7,00		●
2.1.3.8 LHP DTT (banpol) yg diterbitkan	Sub IKU	Triwulanan				7,00		●
▼ 2.1.4 Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	IKU	Triwulanan	100,00%	100,00%	100,00 %		100	●
2.1.4.1 Jumlah Putusan Inkras dan Dinyatakan Menang	Sub IKU	Triwulanan						●
2.1.4.2 Jumlah Gugatan yang Diputuskan pada Periode Berjalan	Sub IKU	Triwulanan						●

3 PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN ORGANISASI	Perspektif	Trisulanan					98,45	●
Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan	Sasaran Strategis	Trisulanan					95,21	●
3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	IKU	Trisulanan	5,00	5,00	4,66		93,2	●
3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	IKU	Trisulanan	5,00	5,00	4,76		95,2	●
3.1.3 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	IKU	Trisulanan	100,00%	100,00%	98,59 %		98,59	●
3.1.3.1 Jumlah Pegawai	Sub IKU	Trisulanan					71,00	●
3.1.3.2 Jumlah Pegawai yang diputuskan melanggar Kode Etik dan/atau Disiplin	Sub IKU	Trisulanan					1,00	●
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	Sasaran Strategis	Trisulanan					99,45	●
3.2.1 Hasil Evaluasi itama atas Akuntabilitas Kinerja	IKU	Trisulanan	AA	AA	A		90	●
3.2.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	IKU	Trisulanan	95,00%	95,00%	98,31 %		103,49	●
3.2.2.1 Tingkat pemanfaatan layanan dasar: email dan eDrive	Sub IKU	Trisulanan					100,00 %	●
3.2.2.2 Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi umum: S/DMM	Sub IKU	Trisulanan					94,37 %	●
3.2.2.3 Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi pemeriksaan: SMP dan portal eAudit	Sub IKU	Trisulanan					100,00 %	●
3.2.3 Jumlah Best-Practice yang Disusun	IKU	Trisulanan	1,00	1,00	1,00		100	●
3.2.4 Tingkat Penerapan Best-Practice	IKU	Trisulanan	100,00%	100,00%	100,00 %		100	●
3.2.5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	IKU	Bulanan	100,00%	100,00%	110,00 %		105	●
3.2.5.1 Jumlah Laporan Kinerja Tahunan yang Disampaikan Tepat Waktu	Sub IKU	Trisulanan					1,00	●
3.2.5.2 Jumlah Laporan Kinerja Trisulanan yang Disampaikan Tepat Waktu	Sub IKU	Trisulanan					4,00	●
3.2.5.3 Jumlah Laporan Output yang Disampaikan Tepat Waktu	Sub IKU	Bulanan					12,00	●
3.2.6 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	IKU	Trisulanan	88,00%	88,18%	88,18 %		100	●
3.2.6.1 Persentase pemenuhan Sarana sesuai Standar	Sub IKU	Trisulanan					91,66 %	●
3.2.6.2 Persentase pemenuhan Prasarana sesuai Standar	Sub IKU	Trisulanan					84,70 %	●
3.2.7 Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	IKU	Trisulanan	2,00	2,00	5,00		105	●
3.2.7.1 Jumlah media workshop/editor forum	Sub IKU	Trisulanan					1,00	●
3.2.7.2 Jumlah siaran pers/konferensi pers	Sub IKU	Trisulanan					5,00	●
3.2.7.3 Jumlah media visit, pers lunch/coffee morning dan wawancara	Sub IKU	Trisulanan						●

3.2.7.3 Jumlah media visit, pers lunch/coffee morning dan wawancara	Sub IKU	Trisulanan						●
Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan	Sasaran Strategis	Trisulanan					100	●
3.3.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	IKU	Trisulanan	100,00%	100,00%	100,00 %		100	●
3.3.1.1 Jumlah pemeriksa yang memenuhi jam pelatihan 40 jam	Sub IKU	Trisulanan					33,00	●
3.3.1.2 Jumlah pemeriksa pada satuan kerja	Sub IKU	Trisulanan					33,00	●
3.3.2 Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/ manajerial (non pemeriksa)	IKU	Trisulanan	100,00%	100,00%	100,00 %		100	●
3.3.2.1 Jumlah pegawai non pemeriksa yang memenuhi jam pelatihan 20 jam	Sub IKU	Trisulanan					28,00	●
3.3.2.2 Jumlah pegawai non pemeriksa pada satuan kerja	Sub IKU	Trisulanan					28,00	●
4 PERSPEKTIF KEUANGAN	Perspektif	Trisulanan					105	●
Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan	Sasaran Strategis	Trisulanan					105	●
3.4.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	IKU	Trisulanan	80,00%	80,00%	87,10 %		105	●
3.4.1.1 Penyerapan anggaran	Sub IKU	Trisulanan					97,06 %	●
3.4.1.2 Konsistensi antara perencanaan dan implementasi	Sub IKU	Trisulanan					99,63 %	●
3.4.1.3 Pencapaian keluaran	Sub IKU	Trisulanan					99,58 %	●
3.4.1.4 Efisiensi	Sub IKU	Trisulanan					56,77 %	●